

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak era reformasi tahun 1998 di Indonesia, pola hubungan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalami perubahan, yang sebelumnya menganut era sentralistik yaitu memusatkan seluruh wewenang kepada pusat berubah menjadi era desentralisasi yang berlaku sejak 1 Januari 2001 pelaksanaan otonomi daerah yang merupakan wujud dari berlakunya desentralisasi mulai diberlakukannya di Indonesia.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kedua undang-undang di bidang otonomi daerah tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk menggali potensi daerahnya dan menetapkan prioritas pembangunan. Tujuan dari desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yaitu mendorong demokratisasi di daerah, mencegah disintegrasi bangsa, meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah, memajukan dan meningkatkan daya saing

daerah, mendekatkan pelayanan kepada publik, dan memberdayakan masyarakat.

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tidak akan memberikan arti apabila tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (Harianto dan Adi, 2007).

Dalam menciptakan kemandirian daerah, pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah. Tuntutan untuk mengubah struktur belanja menjadi semakin kuat, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami kapasitas fiskal rendah (Halim, 2001). Dalam upaya peningkatan kemandirian daerah pemerintah daerah juga dituntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki dan salah satunya memberikan proporsi Belanja Modal yang lebih besar untuk pembangunan pada sektor-sektor yang produktif di daerah (Harianto dan Adi, 2007).

Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran ini ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai

akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga digunakan diantaranya untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur didalam sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi sehingga masyarakat pun turut menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor tersebut, produktifitas masyarakat pun menjadi semakin tinggi dan pada akhirnya terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi (Harianto dan Adi, 2007).

Pertumbuhan ekonomi sering di ukur dengan menggunakan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB), namun demikian, indikator ini dianggap tidak selalu tepat dikarenakan tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya. Indikator lain, yaitu Pendapatan per Kapita yang dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2004).

Pendapatan per Kapita merupakan salah satu indikator apakah kesejahteraan masyarakat di suatu daerah mengalami peningkatan atau penurunan. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada bagian penjelasan pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa jumlah penduduk merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan akan penyediaan layanan publik di

setiap daerah. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui lebih lanjut seberapa besar pengaruh keuangan daerah terhadap pendapatan per kapita

Berdasarkan latar belakang yang ada, penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul sebagai berikut “PENGARUH BELANJA MODAL DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP PENDAPATAN PER KAPITA (Studi pada pemerintah Kabupaten dan Kota Se-Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2009-2011)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai latar belakang masalah, maka masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan per Kapita?
2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan per Kapita?
3. Bagaimana pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan per Kapita?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Belanja Modal terhadap terhadap Pendapatan per Kapita.

2. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan per Kapita.
3. Untuk membuktikan secara empiris mengenai pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan per Kapita.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis berharap penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi:

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah

Penelitian ini diharapkan sebagai informasi untuk mengetahui faktor apa saja dalam keuangan daerah yang dapat mempengaruhi pendapatan per kapita.

2. Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan per Kapita di Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah.

3. Peneliti lainnya

Hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan literature dalam penelitian selanjutnya dengan lebih luas dan mendalam.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan mengenai teori-teori dan pendapat-pendapat yang berhubungan dengan masalah penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritis dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Menguraikan mengenai ruang lingkup penelitian data dan sumber data, definisi operasional, variabel dan pengukuran variabel, teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang pembahasan gambaran umum penelitian, pengujian kualitas pengumpulan data, hasil pengujian asumsi serta pengujian hipotesis yang merupakan usaha untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penelitian.